



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS, DAN BPWS)**

Tahun Sidang	: 2011 – 2012
Masa Sidang	: IV
Rapat	: Ke – 17 (tujuh belas)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Senin, 25 Juni 2012
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10:30 WIB s.d 19.00 WIB
Tempat	: Ruang Jasmine 3, Hotel Intercontinental, Jln. Jend. Sudirman – Jakarta Pusat
Acara	: Pembahasan Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, dan Kegiatan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2013.
Ketua Rapat	: H. Mulyadi
Sekretaris	: Dra. Prima M.B. Nuwa, M.Si.
Hadir Anggota	: dari 54 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Ketua Rapat membuka rapat pukul 10:30 WIB setelah kuorum terpenuhi, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Dalam pengantarnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol pada hari ini adalah dalam rangka Pembahasan Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, dan Kegiatan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2013.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol untuk menyampaikan penjelasan dan paparannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi V DPR RI akan mendalami lebih lanjut program kegiatan yang disampaikan pada RKP 2013, dengan alokasi anggaran pada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp. 34.571 Miliar.
2. Komisi V DPR RI meminta Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum agar menerapkan penyusunan anggaran berbasis kinerja dengan melakukan seleksi usulan secara ketat, sehingga tidak ada lagi program/kegiatan yang diragukan *outcome*-nya dapat lolos dalam usulan pada Tahun Anggaran 2013.
3. Komisi V DPR RI meminta Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum agar selektif mengusulkan pekerjaan jasa konsultansi (non fisik) dengan *outcome* yang terukur serta dalam pemaketan pekerjaannya mempertimbangkan ketersediaan tenaga ahli berdasarkan hasil studi dan masukan dari Badan Pembinaan Konstruksi.
4. Komisi V DPR RI meminta Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum agar memeriksa paket pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2011 dan menerapkan mekanisme penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) termasuk pemberian *blacklist* pada penyedia jasa sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Terhadap kegiatan pengadaan tanah jalan bebas hambatan dalam pengaturan dan pembinaan teknik preservasi, peningkatan kapasitas jalan Tahun Anggaran 2013, Komisi V DPR RI perlu melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum.
6. Komisi V DPR RI meminta Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum agar anggaran pemeliharaan rutin jalan dan jembatan ke depan tidak melalui tugas pembantuan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tetapi tetap ditangani langsung oleh Balai.
7. Komisi V DPR RI mendesak Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum agar menyempurnakan sistem informasi jaringan jalan dan diperbarui secara berkala.
8. Komisi V DPR RI dan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum sepakat untuk membuat terobosan program dalam rangka membantu fasilitasi penanganan jalan daerah yang kondisinya saat ini secara rata-rata baru mencapai 55% mantap.
9. Komisi V DPR RI dan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum sepakat untuk menggunakan *rigid pavement* (beton) pada APBN Tahun Anggaran 2013 terhadap seluruh pelebaran jalan, rekonstruksi, dan pembangunan jalan baru, sepanjang memenuhi persyaratan teknis.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 19.00 WIB.

Jakarta, 25 Juni 2012

KETUA RAPAT,

TTD

H MULYADI

**DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM,**

KEPALA BADAN PENGATUR JALAN TOL,

TTD

TTD

DJOKO MURJANTO

A. GANI GHAZALI

